



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 7 Maret 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 09.45 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: Mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana letusan Gunung Anak Krakatau di selat Sunda.
Ketua Rapat	: Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Kepala BMKG, Kepala Badan SAR Nasional, Dirjen Hubud, Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Sekda Prov. Banten, Ka Badan Penanggulangan Bencana Prov. Lampung, Sekda Kabupaten Lampung Selatan, beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 09.45 WIB, kemudian diskors selama 15 menit. Setelah kuorum terpenuhi skors dicabut dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan diwakili Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Dirjen Hubud, Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan, Sekda Prov. Banten, Ka. Badan Penanggulangan Bencana Prov. Lampung, Sekda Kabupaten Lampung Selatan, pada hari ini adalah untuk membahas antisipasi kemungkinan terjadinya bencana letusan Gunung Anak Krakatau di selat Sunda.
3. Ketua mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Kepala BMKG, Sekda Provinsi Banten, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung, Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Kepala Badan SAR Nasional, Dirjen Hubud, dan Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, BMKG, Basarnas, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemprov. Banten, Pemprov. Lampung, dan Pemkab. Lampung Selatan atas langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan terhadap kemungkinan bencana meletusnya Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah terutama terkait upaya pemberian peringatan dini kepada masyarakat, mendorong pemberian informasi yang akurat mulai dari skala terkecil hingga skala terbesar dan upaya sosialisasi informasi yang tepat kepada masyarakat.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami informasi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, BMKG, Basarnas, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, Pemprov. Banten, Pemprov. Lampung, dan Pemkab. Lampung Selatan, bahwa masih kecil kemungkinan meletusnya Gunung Anak Krakatau seperti kejadian tahun 1883 dalam waktu dekat, namun demikian Komisi V DPR RI meminta kepada instansi terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaannya.
3. Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kajian pembangunan Jembatan Selat Sunda serta meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memasukkan prakiraan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam kajian teknis.
4. Komisi V DPR RI mendorong BMKG untuk mengintegrasikan data pengamatan *buoy* dari BPPT dan data pengamatan *Tide Gauge* dari Bakosurtanal dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami khususnya di wilayah kawasan Selat Sunda.
5. Komisi V DPR RI mendukung Basarnas untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimilikinya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa dan/atau musibah pelayaran serta musibah lainnya di kawasan selat Sunda.
6. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan khususnya Kabupaten Lampung Selatan untuk terus meningkatkan upaya-upaya yang diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di kawasan tersebut.
7. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Darat yang telah berhasil mengatasi kemacetan antrean penyeberangan Merak-Bakauheuni, selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Darat untuk melakukan upaya-upaya antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali dimasa mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 7 Maret 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

KEPALA BMKG,

ttd

SRI WORO B. HARIJONO

KETUA RAPAT,

ttd

YOSEPH UMARHADI

KEPALA BASARNAS,

ttd

LETJEN. TNI (MAR) NONO SAMPONO

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ttd

HERRY BAKTI

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd

SUROYO ALIMOESO

DIRJEN PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM,
KEMENTERIAN KEHUTANAN

ttd

DARORI

KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ESDM,

ttd

R. SUKHYAR

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

H. MUHADI

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

ALBAR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUTONO